



**KONTESTASI PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 1999 DI
KABUPATEN PAMEKASAN: PERGESERAN PEMILIH DARI GOLKAR
KE PKB**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

AZIZAH KUSUMA DARA

NIM 13030114130040

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Azizah Kusuma Dara, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 17 Oktober 2018

Penulis,

Azizah Kusuma Dara

NIM 13030114130040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Beriman, Berilmu, Beramal”

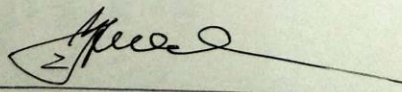
Ali Ihsanul Qauli

Dipersembahkan untuk:

Untuk bapak ibu, Mas Ichang, Mas Basri, dan Chacha.

Disetujui,

Dosen Pembimbing,

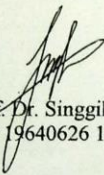


Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.
NIP 19610605 198603 2 001

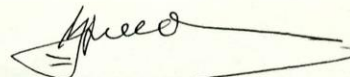
Skripsi dengan judul "Kontestasi Partai Politik Pada Pemilu Tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan: Pergeseran Pemilih dari Golkar ke PKB" yang disusun oleh Azizah Kusuma Dara (NIM 13030114130040) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Rabu, 17 Oktober 2018.

Ketua,

Anggota I,

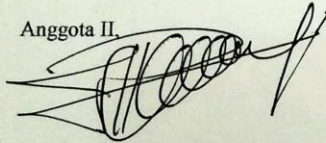


Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.
NIP 19640626 198903 1 003



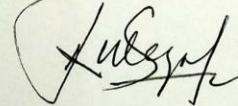
Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.
NIP 19610605 198603 2 001

Anggota II,



Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.
NIP 19670311 199303 1 004

Anggota III,



Dra. Titiek Suliyati, M. T.
NIP 19561219 198703 2 001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.
NIP 19590307 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Kontestasi Partai Politik Pada Pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan: Pergeseran Pemilih dari Golkar ke PKB”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk penyelesaian tugas akhir di Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberi bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan izin penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dra. Titiék Suliyati, M.T., selaku dosen wali yang telah memberikan perhatian pada proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya turut penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan memberi perhatian pada penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum., Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., serta Dra. Titiék Suliyati, M. T., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perkembangan skripsi agar semakin baik.

Penulis turut mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen-dosen pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bagian akademik Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis untuk memudahkan segala urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu dirumah yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan mudah. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak-kakak penulis, Mas Icing dan Mas Basri yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada

adik penulis, Chacha yang sudah menghibur dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa instansi yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari sumber skripsi. Pertama, penulis mengucapkan terimakasih kepada pegawai Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur yang telah menyimpan arsip dengan sangat rapi sehingga penulis dapat menemukan sumber primer. Kedua, penulis mengucapkan terimakasih kepada pegawai Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang telah memudahkan penulis mencari sumber statistik. Ketiga, penulis mengucapkan terimakasih kepada pemilik dan karyawan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya yang telah mengizinkan penulis mencari sumber koran. Keempat, penulis mengucapkan terimakasih juga kepada Monumen Pers yang telah mengizinkan penulis mencari sumber koran. Penulis turut mengucapkan terimakasih kepada karyawan Kompas dan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro yang telah memudahkan penulis mencari sumber koran untuk keperluan skripsi.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua teman-teman Sejarah 2014 yang telah banyak membantu serta memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tentu ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik untuk penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLINAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	22
1. Kondisi Geografis	22
2. Kondisi Demografis	25
B. Kondisi Sosial Budaya	26
C. Kondisi Sosial Ekonomi	29
D. Kondisi Sosial Politik	32
BAB III KONTESTASI GOLKAR DAN PKB PADA PEMILU 1999	
A. Penyelenggaraan Pemilu	38
B. Kontestan Pemilu	46
1. Golkar dan strategi politiknya	46
2. PKB dan strategi politiknya	50
C. Hasil Perebutan Massa dari Golkar ke PKB	55

BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONTESTASI GOLKAR DAN PKB	
A. Meredupnya Kekuatan Politik Golkar	58
1. Peristiwa lengsernya Soeharto	58
2. Pindahnya Kader Golkar ke Partai Politik lain	59
3. Munculnya Partai Politik Baru	61
B. Tampilnya PKB Dalam Panggung Politik Lokal	62
1. Sikap Politik NU dan Pandangan Kyai Terhadap Khittah NU	62
2. Lahirnya PKB Sebagai Partainya Orang NU	65
3. Berpindahnya Kyai NU ke PKB	66
C. Ideologisasi Politik Aliran Oleh Kyai	68
1. Peran Kyai dalam Politik	68
2. Partisipasi Politik Umat Islam	71
BAB V SIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR INFORMAN	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD/ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
AMPG	: Angkatan Muda Partai Golkar
AMPI	: Angkatan Muda Pembaruan Indonesia
Bakengbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BPS	: Badan Pusat statistik
BT	: Bujur Timur
Caleg	: Calon Legislatif
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
Ha	: Hektar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HWK	: Himpunan Wanita Karya
IPNU	: Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
IPPNU	: Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
KOSGORO	: Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong - Royong
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
LS	: Lintang Selatan
MKGR	: Musyawarah Kekeluargaan Gotong - Royong

Munaslub	: Musyawarah Luar Biasa
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nasdem	: Nasional Demokrat
NU	: Nahdlatul Ulama
OKK	: Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKU	: Partai Kebangkitan Ummat
PNU	: Partai Nahdlatul Ulama
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PUI	: Partai Umat Islam
Pemilu	: Pemilihan Umum
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SD	: Sekolah Dasar
SI	: Sarekat Islam
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOKSI	: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia

SARA : Suku, Agama, Ras
TPS : Tempat Pemungutan Suara
UUD : Undang - Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

Afiliasi	: Masuk menjadi anggota atau mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang
Aklamasi	: Pemberian suara dalam rapat, tidak dengan dihitug, hanya dengan lisan dan semua menyatakan setuju
Aspirasi politik	: Harapan dan tujuan utuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
<i>Bargaining power</i>	: Kekuatan tawar menawar dalam strategi politik
Daerah rawan	: Daerah yang sering terjadi kerusuhan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Biasanya daerah rawan sudah diawasi lebih ketat oleh pihak kepolisian jauh sebelum pelaksanaan pemilu di mulai.
Depolitisasi	: Peniadaan atau penghapusan kegiatan-kegiatan politik terutama politik praktis
Dominasi	: Penguasaan oleh suatu pihak yang lebih kuat atas pihak yang lemah
Elit partai	: Golongan yang terpandang atau orang-orang yang terpilih dalam suatu kelompok partai politik
Fusi partai	: Penyatuan beberapa partai politik yang memiliki kesamaan aliran
Hegemoni	: Pengaruh kepemimpinan atau dominasi kekuasaan
Ideologi	: Konsep dan cara berpikir seseorang atau suatu golongan yang teratur atau bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan dalam segala aspek kehidupan

Implikasi politik	: Mempunyai hubungan keterlibatan dalam kebijakan politik yang dijalankan
Intervensi	: Tindakan mencampuri urusan politik orang atau organisasi politik
Isu politik	: Masalah-masalah politik yang dikedepankan untuk menggaet massa
Kader	: Orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan-pekerjaan penting dalam pemerintahan, atau partai politik
Kekuatan politik	: Kekuatan yang dimiliki oleh partai politik atau seseorang yang digunakan untuk menggaet massa dalam kontestasi politik
Khittah NU	: Landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Koalisi	: Gabungan kerjasama antara beberapa partai politik untuk memperoleh suara yang signifikan dalam parlemen
Kontestasi politik	: Perlombaan atau persaingan antar berbagai partai politik untuk memenangkan suara terbanyak untuk melanggengkan kekuasaan di parlemen
Kooptasi	: Proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pimpinan suatu organisasi, guna mencegah terjadinya gangguan terhadap organisasi tersebut
Legitimasi	: Pengakuan umum terhadap suatu lembaga atau sistem politik yang dianggap paling wajar dan disetujui
Mobilisasi massa	: Upaya pengerahan banyak orang terhadap suatu tujuan tertentu

<i>Money politic</i>	: Salah satu strategi politik yang sering digunakan oleh partai politik
Partisipasi politik	: Pengambilan bagian atau peranan dalam suatu kegiatan politik
Pemilih rasional	: Orang yang memilih pilihan politiknya sesuai alasan logis dari pikirannya terhadap suatu partai politik
Pemilih tradisional	: Orang yang memilih pilihan politiknya sesuai dengan pilihan seseorang yang sangat dipercayainya
Pilihan politik	: Berbagai macam kekuatan politik yang dapat dipilih oleh masyarakat
Politik identitas	: Mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumber dan sarana politik.
Politik praktis	: Upaya terjun ke dunia politik secara langsung
Politisasi agama	: Penggunaan ranah agama untuk mendompleng citra partai politik dalam mencari pemilih sebanyak-banyaknya
Rekonsiliasi	: Perbuatan memulihkan pada keadaan semula; perbuatan memperbaharui seperti semula
Represif	: Tindakan yang bersifat menekan, mengekang, atau menindas
Sosialisasi politik	: Proses mengenalkan kepada masyarakat terkait program-program partai politik
Status quo	: Keadaan tetap atau orang yang bertahan dan cenderung menentang setiap perubahan
<i>Vote getter</i>	: Tambang suara dalam pemilihan umum. biasanya terletak dari pengaruh seseorang dalam partai politik maupun dalam masyarakat luas

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan tahun 1999	23
2.2. Jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan	25
2.3 Pondok Pesantren dan Santri per kecamatan tahun 1999	28
2.4 Pendidikan di Kabupaten Pamekasan	29
2.5 Pencari Kerja menurut tingkat pendidikan	30
2.6 Kursi DPRD Kabupaten Pamekasan Hasil Pemilu 1977-1997	36
2.7. Organisasi Politik Peserta Pemilu 1999	37
3.1 Daftar pemilih yang terdaftar di setiap kecamatan di Pamekasan	40
3.2 Hasil Pemilu 1999 Kabupaten Pamekasan	43
3.3 Anggota Terpilih DPRD II Pamekasan Hasil Pemilu Tahun 1999	45
3.4 Perbandingan perolehan suara pemilu 1997 dan 1999	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
A. Organisasi Politik Peserta Pemilu 1999 Pamekasan	88
B. Perolehan kursi DPRD pada Pemilu 1977-1997	94
C. Sumber Koran	95

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Kontestasi Partai Politik Pada Pemilu Tahun 1999 di Pamekasan: Pergeseran Pemilih dari Golkar ke PKB” ini mengkaji beberapa permasalahan, yaitu Pertama, bagaimana dan mengapa terjadi kontestasi antara Golkar dan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan serta bagaimana hasil dari kontestasi itu? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontestasi Golkar dan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan tersebut? Dalam mengkaji permasalahan tersebut, digunakan empat tahap dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sejarah politik, karena kontestasi diantara partai politik merupakan peristiwa politik yang melibatkan pelaku atau aktor politik dengan latar belakang ideologi dan aliran politiknya. Meskipun dalam konteks ini juga terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakatnya, tetapi yang menjadi inti dari kajian skripsi ini adalah aspek politik dari kontestasi partai politik Golkar dan PKB, maka pendekatan sejarah politik menjadi sangat relevan.

Pemilu 1999 menjadi salah satu pemilu yang sukses di selenggarakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal tersebut didasarkan pada keikutsertaan 48 partai politik yang menjadi peserta dan suasana pemilu yang terbuka tanpa ada intervensi kuat dari kekuatan penekan yang berafiliasi dengan pemerintah maupun aparat keamanan sebagaimana yang menjadi tradisi rezim Orde Baru. Pada pelaksanaan Pemilu 1999 di Pamekasan terdapat 35 partai politik kontestan pemilu yang bersaing, karena yang terdaftar secara resmi hanya 35 partai politik. Beberapa partai politik lainnya tidak mempunyai struktur organisasi di Pamekasan. Golkar sebagai kekuatan politik lama menggunakan berbagai strategi politik seperti penggunaan organisasi massa seperti Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), pemasangan atribut partai, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial. Begitu pula dengan PKB sebagai partai baru, strategi politik yang digunakan antara lain sosialisasi visi, misi, dan tujuan partai oleh kyai melalui pengajian, penggunaan organisasi massa NU seperti Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Fatayat, Ansor, pemasangan atribut partai, dan penggunaan isu politik. Pada hasil perolehan Pemilu 1999 di Pamekasan, suara Golkar merosot jauh tertinggal dari PPP yang merupakan pesaingnya sejak masa Orba. Golkar hanya memperoleh sekitar tiga puluh enam ribu suara atau 4 kursi di DPRD, sedangkan PPP memperoleh lebih dari seratus lima puluh ribu suara atau 16 kursi di DPRD. Adapun PKB dengan perolehan suara mencapai lebih dari seratus ribu atau 11 kursi di DPRD, mengalahkan suara Golkar pada pemilu pertamanya ini. Pergeseran suara pemilih yang terjadi antara Golkar dan PKB disebabkan oleh berbagai faktor baik Golkar maupun PKB. Akan tetapi kekuatan politik kyai NU menjadi faktor penentu terjadinya pergeseran pemilih di Pamekasan. PKB sebagai partai politik baru warga NU sekaligus tempat bersatunya kyai NU dalam menyuarkan aspirasi politik.

ABSTRACT

The thesis entitled "Political Party Contestation in the 1999 Election in Pamekasan: The Shift from Golkar to PKB" examines several problems. First, how and why the contestation between Golkar and PKB occurred in the 1999 election in Pamekasan District and what was the outcome of the contest? Second, what factors influenced the contestation between them at that time? In reviewing these problems, four stages are used in the historical method, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Meanwhile, the approach used is political history, because contention among political parties is a political event involving political actors with their own ideological backgrounds and political flow. Although, in this case, this study is also related to the socio-cultural conditions of the local community, the core aim of this thesis is the political aspect of the contestation between Golkar and PKB, thus the political history approach is very relevant.

The 1999 election became one of the most successful elections ever held at both national and regional levels. This was depicted on the participation of 48 political parties in the election and an open election atmosphere without any strong interventions from the pressure forces affiliated with the government and security forces as was commonly happening of the New Order regime. During the 1999 election in Pamekasan, there were 35 competing political contestants in election, because only 35 political parties were officially registered. Some other political parties did not have an organizational structure in Pamekasan. Golkar as an old political force used numerous political strategies such as the use of mass organizations including Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), installation of party attributes, and the implementation of social activities. Likewise, PKB as a new party, its political strategies used included socialization of the party's vision, mission, and goals by the priests (kyai) through religious meetings, the use of NU mass organizations such as Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Fatayat, Ansor, installation of party attributes, and using political issues. On the results of the 1999 election in Pamekasan, Golkar's vote dropped far behind PPP which was its rival since the New Order era. Golkar only obtained about thirty-six thousand votes or 4 seats in the DPRD, while PPP received more than one hundred fifty thousand votes or 16 seats in the DPRD. Surprisingly, the PKB, with votes reaching more than one hundred thousand or 11 seats in the DPRD, defeated Golkar's vote in its first election. The shift in voters between Golkar and PKB was caused by various factors, both in Golkar and PKB. However, the political strength of the NU's clerics was a determining factor shifting voters in Pamekasan. PKB was a new political party of NU community as well as a place for NU priests to unite voicing political aspirations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Demokrasi dalam banyak hal menjadi sebuah cita-cita negara, karena penerapan sistem demokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Begitu pula dengan Indonesia, secara konstitusional menganut sistem demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD). Esensi demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dan hal itu diwujudkan antara lain dari adanya badan/lembaga perwakilan rakyat yang mekanisme pembentukannya melibatkan rakyat secara langsung (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, dll.). Selain itu, adanya pelibatan rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang menentukan jalannya pemerintahan (Partai Politik, Pemilihan Umum).

Di kebanyakan negara demokrasi termasuk Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari penerapan sistem demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan adanya akurasi partisipasi dan aspirasi masyarakat yang tinggi dan baik.¹ Pemilu merupakan simbol yang dipakai oleh semua negara yang mengklaim dirinya demokrasi, walaupun dalam pelaksanaan makna demokrasi tersebut menjadi sangat relatif. Pemilu adalah sarana untuk membentuk perwakilan politik, dengan cara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislatif, maupun memilih pemimpin puncak eksekutif.² Penyelenggaraan Pemilu menjadi sarana untuk warga negara ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik,

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

²Revolt Institute, "Perilaku Memilih" (Lima Puluh Kota: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015), hlm. 1.

karena melalui Pemilu warga negara ikut menentukan wakil rakyat yang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat di pusat maupun daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, preferensi suara pemilih adakalanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat primordial seperti etnik maupun agama dan hal itu terjadi pada hampir semua penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak Pemilu I tahun 1955. Upaya menarik suara pemilih tidak hanya terjadi dalam konteks nasional untuk memilih calon-calon anggota DPR RI, namun juga terjadi dalam konteks lokal untuk memilih calon-calon anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Dinamika yang terjadi dalam pemilihan umum di daerah-daerah memberikan gambaran bahwasanya setiap partai politik memiliki basis pemilih yang berbeda-beda. Perbedaan basis pemilih setiap partai politik masa Orba sudah dimulai sejak fusi partai diberlakukan pada Pemilu tahun 1977. Namun pada pemilu pertama masa Orba yakni Pemilu 1971, peserta pemilu berjumlah 10 partai politik. Akan tetapi, pada pemilu selanjutnya hanya terdapat tiga kekuatan politik peserta (kontestan) pemilu, yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kemudian menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada tahun 1996. Setiap partai politik dan Golkar tersebut memiliki basis massa yang berbeda-beda. Golkar memiliki basis pemilih yang cenderung dibangun oleh para birokrat dan militer sebagaimana yang menjadi kebijakan politik pemerintahan Orba.³ Partai PPP memiliki basis massa yang berasal dari orang-orang Islam atau pesantren. Adapun PDI memiliki basis orang-orang nasionalis baik yang religious maupun sekuler.

Di Kabupaten Pamekasan partai-partai politik juga turut bersaing dalam merebut dukungan pemilih. Secara umum pemilih di Kabupaten Pamekasan didominasi oleh pemilih umat Islam. Hal tersebut berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan yang umumnya didominasi oleh penduduk Islam. Partai-partai politik berbondong-bondong menarik minat pemilih umat Islam. Diketahui bahwa Pemilu yang berlangsung tahun 1990-an, kondisi politik yang terjadi di

³Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 303.

Kabupaten Pamekasan lebih didominasi oleh dua partai yakni Golkar dan PPP. Kedua partai tersebut menjadi partai yang paling banyak mendapatkan suara pemilih, sedangkan untuk PDI hanya memperoleh sedikit suara pemilih. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil Pemilu tahun 1992, PDI hanya mendapatkan 2 kursi dan Pemilu 1997 bahkan tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD. Faktor yang mempengaruhi minimnya suara pemilih PDI di Kabupaten Pamekasan adalah ikatan keagamaan (Islam) yang cukup kental pada masyarakat Pamekasan. Keterikatan masyarakat Pamekasan dengan sosok kiai yang menjadi panutan dalam berkehidupan sehari-hari, menjadikan ikatan religiusitas yang ada dalam masyarakat Pamekasan terjalin begitu kuat. Kondisi sosial seperti inilah yang menjadi alasan minimnya orang-orang berideologi nasionalis yang cenderung memilih PDI dalam Pemilu di Kabupaten Pamekasan.

Berakhirnya masa Orba menandai era baru munculnya partai-partai politik baru seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian menjadikan pengaruh Golkar di Kabupaten Pamekasan semakin kecil. Munculnya PKB sebagai partai NU menyebabkan banyak pemilih Golkar yang beralih ke PKB di Pamekasan. Pergeseran pemilih ini disebabkan tidak adanya kyai besar yang bergabung dengan Partai Golkar, sehingga pendukung Golkar mudah digiring opini publik yang dibuat PKB dalam upayanya menarik dukungan.⁴

Terjadinya pergeseran pemilih yang didominasi oleh warga NU dari Golkar ke PKB, rupanya tidak cukup untuk menurunkan jumlah pemilih umat Islam dari partai PPP. Diketahui bahwa umat Islam dari warga NU sudah lama banyak yang bergabung pada PPP sejak adanya fusi partai politik masa Orba. Dengan bergabungnya berbagai partai berbasis Islam, menjadikan PPP partai yang banyak mendapatkan suara pemilih di Kabupaten Pamekasan. Pada pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan, PPP tetap mendominasi suara pemilih umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemilu 1999 di mana PPP memperoleh suara terbesar sehingga mendapatkan 16 kursi di DPRD.

⁴Wawancara dengan Zainal Alim, 23 Oktober 2017. Beliau adalah ketua bagian OKK (Organisasi dan Kader) Golkar pada tahun 1997.

Partisipasi politik warga NU juga dipengaruhi oleh kebijakan dari organisasi NU. Diketahui bahwa Munas alim ulama NU yang diselenggarakan di Situbondo pada Desember 1983 mengeluarkan dua keputusan yaitu menarik diri dari politik praktis dan mengikuti tuntunan asas tunggal Pancasila. Selain itu, mempertegas kedua keputusan tersebut dengan melakukan perubahan dalam anggaran dasar NU.⁵ Khittah NU tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada kiai-kiai NU yang ada di Kabupaten Pamekasan. Khittah NU turut mengarahkan ke mana saja arah politik warga NU Pamekasan dalam memutuskan partai politik yang akan dipilih. Warga NU menjadi bagian dalam pemilih Islam yang ikut mengalami pergeseran dalam Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan.

Khittah NU menjadi isu politik yang digunakan PKB dalam kontestasi Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan. Khittah menjadi salah satu alasan keengganan tokoh NU untuk terjun ke dunia politik praktis ternyata tidak menguntungkan kepada masa depan NU dan umat Islam. Oleh karena itu, dengan diawali munculnya PKB diharapkan banyak tokoh NU yang turut terjun langsung dalam perpolitikan, sehingga NU tidak ketinggalan zaman dibidang politik.⁶

Kontestasi antar partai dan munculnya partai politik Islam baru rupanya mampu memecah suara pemilih Islam dalam pemilu. Persaingan antara kekuatan politik lama dan kekuatan politik yang baru di Pamekasan menjadi hal menarik yang ingin dikaji dalam penelitian sejarah ini. Penelitian ini menjadi penting karena masih tidak banyak penelitian yang membahas mengenai persaingan Golkar yang sangat kuat selama Orba dan PKB sebagai partai baru yang lahir masa reformasi. Penelitian ini diharapkan menambah deretan tulisan ilmiah yang membahas tentang kontestasi di antara partai politik dalam pemilu selama Orde Reformasi.

Berdasar latar belakang tersebut muncul permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kontestasi yang terjadi antara Golkar dan

⁵Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 1994) hlm. 113.

⁶Wawancara dengan Fudhali Ruhm, 25 Oktober 2017. Beliau adalah Ketua DPC PKB Pamekasan tahun 1999.

PKB dalam pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan. Golkar sebagai kekuatan politik lama tentu berusaha keras agar bisa mempertahankan pendukungnya dan PKB sebagai kekuatan politik baru yang muncul dalam panggung politik berusaha keras untuk menarik pendukung menjadi basis massanya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam skripsi ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kontestasi antara Golkar dan PKB pada pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan dan bagaimana hasil dari kontestasi tersebut?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontestasi Golkar dan PKB pada Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan?

B. Ruang Lingkup

Penelitian sejarah perlu dibatasi oleh ruang lingkup temporal, spasial, dan keilmuan. Pembatasan penelitian sebaiknya diikuti dengan alasan mengapa penelitian tersebut dibatasi. Hal ini diperlukan oleh peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian agar memiliki arah yang jelas. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah menjadikan penelitian lebih mudah untuk dilakukan secara empiris, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

Lingkup temporal dalam penelitian ini tahun 1999. Pada tahun 1999 dilaksanakan Pemilu pertama di Indonesia pasca keberhasilan gerakan Reformasi pada tahun 1998. Pemilu tahun 1999 ini berbeda dengan Pemilu pada masa Orba. Pada Pemilu 1999 terdapat banyak partai politik yang bersaing memperebutkan suara pemilih baik pada level nasional (DPR RI), regional (DPRD Provinsi) maupun lokal (DPRD Kabupaten/Kota). Sebelumnya pada masa Orba, hanya terdapat 3 partai politik yang bersaing yakni Golkar, PPP, dan PDI. Pada Pemilu 1999 muncul berbagai partai Islam yang siap merebut suara pemilih umat Islam di

⁷Kartini, kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm, 19 dalam *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah 2014*.

Indonesia. Dengan berbagai latar belakang organisasi yang berbeda, suara pemilih Islam dapat menyebar ke berbagai partai Islam maupun partai nasionalis.

Ruang lingkup spasial penelitian adalah Kabupaten Pamekasan, yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut data statistik Kabupaten Pamekasan memiliki 13 kecamatan yang setiap kecamatan memiliki banyak pesantren. Pada tahun 1999 Kabupaten Pamekasan memiliki 165 pesantren.⁸ Berdasar jumlah pesantren, bisa dilihat bagaimana besarnya pengaruh Islam di Kabupaten Pamekasan. Kondisi masyarakat Pamekasan yang seperti ini tentu saja mempengaruhi pilihan politik dalam Pemilu. Pesantren menjadi bagian yang tidak pernah lepas dalam kegiatan politik bagi masyarakat Pamekasan. Dominasi pemilih umat Islam yang cukup besar tentu dipengaruhi oleh kyai-kyai besar pengasuh pondok pesantren. Pemilu yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan selalu berhubungan dengan kyai-kyai besar. Partai politik tidak bisa secara mudah menarik massa tanpa dukungan kyai.

Ruang lingkup keilmuannya adalah sejarah politik. Sejarah politik adalah bahasan sejarah mengenai kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah pemerintahan dan kenegaraan. Sejarah politik juga membahas tentang kekuasaannya pada umumnya.⁹ Adapun pemilu menjadi bagian dalam sistem politik pemerintahan suatu negara, maka penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah politik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu politik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

⁸Badan Pusat Statistik, *Pamekasan Dalam Angka Tahun 1999* (Pamekasan: Badan Pusat Statistik, 1999), hlm 79.

⁹Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Jilid II* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 173-176.

Pertama, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kontestasi yang terjadi antara Golkar dan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan termasuk di dalamnya strategi yang ditempuh dan hasil yang dicapai. Kedua, untuk mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontestasi yang terjadi antara Golkar dan PKB pada pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan baik yang merupakan faktor internal maupun eksternal.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian yang sistematis dan kritis tentang hasil penelitian atau pemikiran peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian. Tinjauan pustaka memuat uraian tentang isi pustaka secara ringkas, penjelasan tentang relevansi (tema, lokasi, permasalahan, atau kerangka pemikiran yang dibangun) antara pustaka yang ditinjau dengan penelitian yang dilakukan sekaligus menunjukkan perbedaannya.¹⁰

Pustaka pertama adalah artikel yang berjudul “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar Dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013” karya Arief Zaafri Razaqtiar.¹¹ Secara garis besar artikel ini membahas tentang strategi partai Golkar dalam kemenangan Juliyatmono-Rohadi. Partai Golkar membentuk strategi politik bersama partai yang

¹⁰Tim Revisi Jurusan Sejarah, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah*, (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, 2014), hlm. 21.

¹¹Arief Zaafri Razaqtiar, “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar Dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013”, *Jurnal Politik Muda* Vol. 5 No. 3, 2016 (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jmpad47651d75full.pdf>, diunduh pada 17 Desember 2017).

bergabung dalam koalisi. Strategi politik yang dipakai dapat dibedakan menjadi dua yakni strategi politik eksternal dan internal.

Strategi politik eksternal adalah strategi yang ditujukan partai politik kepada pihak-pihak yang berada di luar organisasi partai politiknya. Strategi politik eksternal bertujuan untuk meningkatkan bargaining power dan posisi tawar menawar suatu partai politik. Partai Golkar di Kabupaten Karanganyar mempunyai pesaing terbesar yakni PDI-Perjuangan. Golkar tidak mempunyai dukungan suara yang besar jika dibandingkan dengan PDI-Perjuangan. Oleh Karena itu, Golkar tidak memiliki posisi tawar menawar yang kuat dalam hal memperoleh dukungan suara. Untuk itulah bentuk koalisi sangat dibutuhkan. Strategi ini berlaku di tubuh parlemen, di mana anggotanya berasal dari beragam partai politik. Seringkali pasangan calon membutuhkan dukungan dari beberapa partai politik untuk memperbesar kemungkinan memenangkan pemilu.

Dalam kemenangan pilkada ini, Partai Golkar Karanganyar secara aklamasi memilih Juliyatmono yang merupakan sosok yang berpengaruh di partai dan elit dewan. Efektivitas partai Golkar dalam memilih pasangan untuk wakil bupati dipercayakan kepada kader PKS, yakni Rohadi Widodo. Pasangan Yu-Ro dengan kesamaan latar belakang dan pandangan untuk memajukan Karanganyar disadari betul oleh masing-masing partai. Koalisi Yu-Ro ini kemudian didukung oleh partai-partai lainnya seperti PAN, PKPI, Gerindra, dan Nasdem.

Strategi politik internal adalah strategi pemberdayaan dalam struktur, interaksi, dan budaya organisasi yang terdapat dalam tubuh partai politik. Strategi politik internal berfokus untuk membenahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tubuh partai politik. Hal ini dilakukan karena kualitas partai yang baik ditentukan dari kualitas proses internal organisasinya. Dalam memberdayakan para kader, Partai Golkar melakukan diklat fungsionaris. Pelaksana kegiatan ini adalah pengurus yang masuk dalam Lembaga Pengelola Kaderisasi (LPK) partai Golkar. Pengkaderan yang bersifat fungsional ini adalah pengkaderan yang diikuti oleh kelompok-kelompok fungsional berdasarkan pengelompokan strategis (pemuda, pengusaha, perempuan, cendikiawan, pendidik, pekerja). Salah satu kegiatan dalam diklat fungsional ini adalah konsolidasi. Kegiatan konsolidasi

merupakan bagian pendukung dalam sistem kaderisasi untuk membentuk kader-kader profesional yang nantinya akan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Pelaksanaan diklat fungsional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, kapasitas kepemimpinan, dan etos kerja para kader. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan intelektual, pemahaman keorganisasian dan kepekaan sosial bagi kader Golkar. Selain itu, dalam proses kaderisasi partai Golkar melakukan rekrutmen politik melalui pendekatan personal atau kontak pribadi, persuasi, dan cara-cara lain yang dirasa mampu menarik para calon kader untuk siap menjadi calon pemimpin.

Artikel ini menjelaskan bahwa keberhasilan peran Partai Golkar dalam upaya pemenangan pilkada Karanganyar ini tidak hanya berlangsung saat kampanye, bahkan sebelum kampanye dimulai. Juliyatmono telah melakukan beberapa pendekatan kepada warga seperti mendatangi undangan pernikahan warga, mengisi pidato, khutbah di pengajian. Pendekatan seperti ini berguna untuk membangun citra yang baik di masyarakat. Turun ke masyarakat juga berguna untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga strategi partai dalam membuat program kerja bisa tepat sasaran.

Relevansi pustaka ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah memberikan penjelasan mengenai peran partai politik dalam pemenangan calon bupati. Berbagai peran dan strategi dijalankan untuk memenangkan pasangan calon. Penjelasan rinci mengenai strategi politik apa saja yang telah dilakukan, dapat memudahkan penulis untuk mendeskripsikan strategi politik apa saja yang dapat digunakan partai politik untuk memperoleh jumlah suara terbesar pada Pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan.

Kelebihan pustaka pertama adalah menjelaskan secara rinci strategi yang digunakan Golkar untuk memenangkan calon Juliyatmono-Rohadi. Kekurangan pustaka ini adalah tidak menjelaskan strategi partai politik lainnya sebagai lawan politiknya dalam memenangkan lawan dari Juliyatmono-Rohadi, sehingga tidak menjelaskan persaingan strategi antar partai politik. Dalam artikel ini tidak dibahas

kendala apa saja yang menghambat keberhasilan Partai Golkar, sehingga penulis tidak mengetahui kendala yang mengganggu jalannya proses pemenangan calon.

Perbedaan pustaka pertama dengan skripsi ini terletak pada topik yang diambil dalam penelitian. Topik pustaka pertama lebih terfokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan pada tingkat eksekutif. Adapun skripsi ini berfokus pada pemilu legislatif dalam memilih wakil di DPRD tahun 1999. Permasalahan yang ada dalam pustaka pertama juga berbeda dengan skripsi ini. Permasalahan dalam pustaka pertama berfokus pada strategi dan kendala yang dialami Golkar dalam Pemenangan dalam Pilkada, sedangkan permasalahan dalam skripsi ini tidak hanya pada persaingan strategi antara Golkar dan PKB namun juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kontestasi antara Golkar dan PKB. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari lingkup temporal. Artikel ini mengambil temporal tahun 2013 di mana saat itu pemilu dilaksanakan secara langsung dan kredibilitas calon sangat menentukan kemenangannya. Lingkup temporal skripsi ini pada tahun 1999 di mana merupakan pemilu pertama setelah reformasi muncul yang masih memilih partai. Perbedaan lainnya adalah penulisan artikel ini tidak kronologis, sedangkan skripsi ini menjelaskan kontestasi yang terjadi secara kronologis.

Pustaka kedua adalah karya Mustofa yang berjudul “Analisis Pergeseran Pandangan Politik Massa dari PPP Ke PKB 1999 Di Sampang”.¹² Artikel ini membahas tentang perubahan pandangan politik para kyai Sampang dalam Pemilu tahun 1999. Secara garis besar, artikel ini menjelaskan adanya konflik internal dalam tubuh PPP yang nantinya mengakibatkan keluarnya para kyai NU dari PPP untuk berpindah ke PKB dalam pemilu 1999. Konflik tersebut semakin runcing dengan adanya kontestasi partai Islam pemilu pasca Orba. Berdasarkan pengalaman dua kali pemilu sebelumnya, PPP di Sampang tidak membuahkan hasil pemilu yang

¹²Mustofa, ” Analisis Pergeseran Pandangan Politik Massa dari PPP Ke PKB 1999 di Sampang”, *Education and Development Journal* Vol. 01 No. 01, 2016 (<http://journal.unusa.ac.id/index.php/education/article/download/160/137>, diunduh pada 17 Desember 2017).

cukup untuk memenangkan posisinya di atas Golkar. Pada pemilu sebelumnya malah terjadi kerusuhan pasca pemilu.

Dalam peristiwa ini peran kyai-kyai besar yang berpihak pada PPP menjadi alasan massa bergerak untuk melakukan protes keras terhadap kecurangan yang ada. Namun konflik internal yang terjadi antar kyai dalam tubuh PPP telah muncul sebelum PKB lahir. Setelah PKB muncul, banyak para kyai PPP yang berpindah partai ke PKB. Terdapat beberapa alasan yang mendasari para kyai tersebut untuk berpindah partai. Pertama, memudarnya popularitas dan pengaruh Kyai Alawy Muhammad. Diketahui Kyai Alawy Muhammad adalah kyai besar di Sampang yang berada di pihak PPP dan selalu menjadi yang terdepan dalam kampanye setiap pemilu. Kekuasaan Kyai Alawy Muhammad tidak berkurang sehingga kebijakan dan segala keputusan berdasar keputusan Kyai Alawy. Beberapa kyai memandang hal tersebut sebagai upaya mengkerdilkan peran para kyai lainnya, sehingga ketika PKB muncul banyak para kyai yang beralih ke PKB.

Kedua, perjuangan para kyai di PPP mengalami kejenuhan karena seringkali dikecewakan hasil yang diperoleh tidak sesuai ekspektasi. Perjuangan hingga meletusnya tragedi tahun 1997 yang menelan banyak korban tetap saja tidak membuahkan hasil yang diharapkan meskipun pemilu dilakukan ulang di 67 TPS. Misi yang tidak tersampaikan dengan baik selama di PPP menjadi alasan yang mempengaruhi hijrahnya para ulama.

Bergabungnya banyak ulama ke PKB menyebabkan terjadi pergeseran massa besar-besaran ke PKB. Pandangan politik massa umumnya mengikuti kyai mereka. Dengan menggunakan beberapa isu politik, para ulama yang tergabung dalam PKB rupanya berhasil memborong suara pemilih. Isu politik yang digunakan PKB saat itu adalah PKB sebagai partai refomasi dan partainya orang NU. Pada saat itu PPP dikerdilkan dengan isu politik sebagai partai pro status quo. Isu politik terkait PKB sebagai partainya orang NU turut menyebar pada latar belakang Kyai Alawy Muhammad yang bukan dari kalangan NU.

Persaingan antara dua partai Islam ini semakin besar. Opini yang terus memojokkan PPP dan Kyai Alawy Muhammad kemudian mendapat perlawanan dari pihak PPP yaitu Kyai Alawy Muhammad dan Kyai Zainal Abidin. Akan tetapi,

perlawanan yang dilakukan oleh kedua kyai tersebut cenderung menggunakan cara-cara lama dan tidak kreatif. Pada Saat itu, PKB yang menjadi serangan dalam setiap kesempatan. Kyai Alawy Muhammad tidak segan-segan mengkafirkan semua kyai PKB. Serangan Kyai Alawy Muhammad dalam pembunuhan karakter juga ditujukan kepada Kyai Abdurrahman Wahid dalam setiap kesempatan berceramah. Ia tidak segan-segan mengatakan bahwa Kyai Abdurrahman Wahid seorang PKI, harus dijauhi karena sangat berbahaya. Cara Kyai Alawy Muhammad untuk mempertahankan basis massa PPP tidak berbeda dengan sebelumnya saat PPP dibenturkan dengan Golkar.

Bahasan artikel ini memiliki relevansi dengan skripsi yang akan ditulis. Relevansi artikel kedua dengan skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai kemampuan PKB sebagai partai baru dalam meraih basis massa terbesar. Bahasan tersebut sangat berkaitan dengan rencana penulisan skripsi ini mengenai tampilnya PKB dalam panggung politik lokal. Selain itu, pustaka ini memberikan kemudahan untuk memahami peranan politik kyai yang ada di Sampang untuk dibandingkan dengan peran politik kyai di Kabupaten Pamekasan. Kelebihan yang terdapat dalam pustaka kedua ini adalah penjelasan mengenai alasan kyai-kyai Sampang beralih dari PPP ke PKB serta persaingan politik para kyai yang dijelaskan cukup rinci. Kekurangan pustaka kedua ini adalah kurang sesuai antara judul dan uraian artikel. Judul artikel akan membahas mengenai pergeseran pandangan massa, namun uraian artikel lebih membahas mengenai pergeseran pandangan politik para kyai.

Terdapat beberapa perbedaan yang dapat ditemukan antara pustaka kedua dan skripsi ini. Perbedaan pertama terletak pada permasalahan. Dalam pustaka kedua ini permasalahan yang diajukan adalah munculnya perbedaan pandangan politik antar kyai di Sampang. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh berdirinya PKB sebagai partainya orang NU dan konflik internal di PPP yang membuat banyak kyai keluar dari partai tersebut. Permasalahan skripsi ini lebih berfokus persaingan antara Golkar dan PKB dalam pemilu 1999 sedangkan pustaka kedua lebih berfokus pada persaingan antara dua partai politik Islam. Perbedaan kedua yakni lingkup spasial. Pustaka kedua membahas mengenai persoalan di

Kabupaten Sampang, sedangkan skripsi ini memilih Kabupaten Pamekasan sebagai lingkup spasial.

Pustaka ketiga adalah skripsi yang berjudul “Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang” karya Sutanto.¹³ Secara garis besar, pustaka ini membahas mengenai strategi partai Demokrat dalam kemenangan pemilu legislatif. Penelitian ini juga membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat dalam menerapkan strateginya.

Skripsi ini menjelaskan bahwa Partai Demokrat menggunakan dua strategi yakni strategi komunikasi dan strategi pencitraan. Dalam strategi komunikasi dibedakan menjadi lima cara yakni jaringan kekuasaan tingkat lokal, kegiatan yang terselenggara atau event, sosialisasi, kampanye, dan money politic. Dalam strategi pencitraan, Partai Demokrat menggunakan dua langkah yakni figur pemimpin dan citra partai.

Berdasar pustaka ketiga, jaringan kekuasaan tingkat lokal merupakan kekuasaan elit di tingkat struktural birokrat (pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT RW). Dalam strategi ini, Partai Demokrat melakukan kerjasama dengan perangkat desa untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Cara kedua yakni dengan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan dari partai tapi diserahkan kepada caleg. Partai hanya menjadi kendaraan caleg. Sosialisasi yang diberikan merupakan motivator bagi masyarakat dengan memberikan nilai-nilai politik kepada masyarakat sehingga memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Cara ketiga yakni kegiatan yang terselenggara atau disebut event. Kegiatan yang diadakan untuk mengumpulkan pihak-pihak tertentu untuk saling bertukar pendapat. Kegiatan ini dilakukan Partai Demokrat untuk mendekati diri kepada masyarakat. Kegiatan yang terselenggarakan ini bisa dalam bentuk apa saja, seperti Pemuda Demokrat atau Perempuan Demokrat. Kegiatan yang dilakukan misalnya

¹³Sutanto, “Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang” (Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011).

olahraga sepak bola, remaja masjid dengan pengajian. Cara keempat yakni kampanye. Partai Demokrat menggunakan dua model kampanye, yakni model kampanye terbuka dan tertutup. Kampanye terbuka biasanya melakukan long march, berorasi dihadapan simpatisan dan pendukung partai. Kampanye tertutup dengan mendatangi langsung tokoh-tokoh warga. Cara terakhir yakni money politic. Akan tetapi calon tidak melakukan pemberian uang secara langsung melainkan melalui penyelenggaraan acara.

Pada strategi pencitraan, langkah pertama yang digunakan oleh Partai Demokrat yakni menggunakan figur pemimpin. Seperti diketahui bahwa Partai Demokrat berkaitan erat dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 ini menjadi figur pemimpin yang menjadi kekuatan utama yang digunakan Partai Demokrat untuk mendapatkan suara masyarakat. Langkah kedua yakni menggunakan citra partai. Garis ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis-religius. Sesuai dengan ideologi yang dianut, terbukti bahwa selama kebijakannya Partai Demokrat merupakan partai yang nasionalis, mengakomodir pluralisme, sedangkan religius adalah landasannya. Selain strategi, bahasan terakhir pustaka ketiga ini adalah kendala. Kendala yang dihadapi adalah masalah keuangan. Setiap calon diharuskan memiliki cadangan biaya untuk bisa melakukan kampanye.

Relevansi pustaka ini dengan skripsi yang akan ditulis yakni memberikan tambahan pemahaman mengenai strategi partai dalam memenangkan pemilu legislatif. Berbagai strategi yang dijelaskan memberikan pemahaman kepada penulis terkait strategi Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu. Penjelasan mengenai kendala dalam proses pemenangan Partai Demokrat memberikan kemudahan untuk penulis memahami persoalan lain dalam menjelaskan strategi partai politik.

Kelebihan pustaka ketiga ini menjelaskan berbagai strategi yang bisa membantu penulis memahami strategi partai politik. Kelebihan lain dari pustaka ini adalah dijelaskannya setiap strategi berdasarkan wawancara langsung para anggota DPR dari Partai Demokrat. Pustaka ketiga ini juga memiliki kekurangan yakni tidak menggunakan alur yang kronologis dalam menjelaskan setiap strategi yang dilaksanakan.

Perbedaan antara pustaka ketiga dan skripsi ini terdapat beberapa hal. Perbedaan pertama adalah permasalahan yang dibahas. Pustaka ketiga memuat permasalahan mengenai strategi partai Demokrat serta kendala yang dihadapi dalam memenangkan pemilu legislatif. Skripsi ini lebih berfokus pada permasalahan persaingan antara dua partai politik dalam Pemilu tahun 1999. Permasalahan skripsi ini turut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kontestasi antara Golkar dan PKB. Perbedaan kedua pada lingkup spasial penelitian. Lingkup spasial pustaka kedua berada di Kota Semarang, sedangkan skripsi ini memilih lingkup spasial di Kabupaten Pamekasan.

Pustaka keempat adalah disertasi yang berjudul “Dinamika Politik Kiai dan Santri dalam Pilkada Pamekasan” karya Zainuddin Syarif.¹⁴ Secara garis besar pustaka ini membahas tentang perilaku politisi santri terhadap pilihan politik kiai. Selain itu, pustaka ini turut membahas tentang upaya dan sikap kiai dalam mempertahankan otoritas kepemimpinannya. Pustaka ini menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam menganalisis permasalahan. Penggunaan teori elit dan konflik digunakan dalam pustaka ini untuk menganalisa fenomena ketidakpatuhan santri terhadap pilihan politik kiai dan perbedaan pilihan politik antar kiai.

Disertasi ini membahas mengenai pergumulan politik yang terjadi dibalik layar Pilkada 2008 di Pamekasan. Para kyai NU yang terlibat sebagai pendukung masing-masing pasangan. Suasana panasnya politik tersebut semakin muncul dengan adanya persaingan antara mertua dan menantu (K.H. Mawardi dan K.H. Muafa Asy'ari), sehingga pertarungan tidak dapat dihindari karena masing-masing memiliki basis massa. Adanya persaingan tersebut dipengaruhi adanya konflik yang terjadi baik di internal NU maupun PKB yang menyebabkan K.H. Muafa Asy'ari memilih tidak mendukung pasangan K.H. Kholilurrahman pada Pilkada 5 Maret 2008. Selain itu, disertasi ini juga menjelaskan perilaku politik santri yang dibedakan menjadi tiga yakni kepatuhan politik, ambiguitas sikap politik santri, dan

¹⁴Zainuddin Syarif, “Dinamika Politik Kiai dan Santri dalam Pilkada Pamekasan” (Disertasi pada IAIN Sunan Ampel, 2010).

perbedaan politik santri. Kepatuhan politik menjadi suatu keharusan bagi santri dalam mengabdikan kepada kyainya. Ambiguitas sikap politik santri lebih dipengaruhi oleh adanya tekana dari kyai pesantren tempat santri belajar dengan kyai ngaji tempat santri belajar Al-Quran di Langgar. Perbedaan pilihan politik antara kyai pesantren dan kyai langgar membuat santri memilih tidak memilih, karena tidak ingin mempunyai masalah dengan kyai mereka. Persaingan politik ini tidak lantas menyebabkan rusaknya hubungan antara kyai. Begitu pula dengan hubungan kyai dan santri, secara garis besar tidak putus. Menurut kyai, perbedaan politik yang terjadi antara kyai dan santri dipandang dalam segi positif pintu politik untuk para santri. Keinginan para santri untuk terjun berpolitik disambut positif meskipun berbeda pilihan.

Relevansi pustaka keempat dengan skripsi yang akan ditulis yakni memberikan penjelasan rinci mengenai posisi kyai dalam pilkada hingga persoalan peran santri dan hubungan antara kyai dan santri dalam pergumulan politik di Pilkada Pamekasan. Hal ini memudahkan penulis untuk memahami kondisi politik yang umumnya terjadi di Pamekasan itu seperti apa, dan bagaimana peran kyai dibelakang partai untuk memobilisasi massa.

Perbedaan pustaka keempat dengan skripsi ini terdapat pada topik dibahas. Topik pada pustaka keempat ini berfokus pada pemilihan eksekutif di mana memperebutkan posisi tertinggi di Kabupaten Pamekasan. Adapun skripsi ini membahas tentang pemilihan legislatif di Kabupaten Pamekasan. Perbedaan lainnya yakni pada pendekatan dan kerangka teori yang digunakan. Pustaka keempat menggunakan pendekatan ilmu sosial dan menggunakan teori elit dan konflik dalam menganalisa permasalahan. Adapun skripsi ini menggunakan pendekatan politik dan konsep-konsep dalam ilmu politik untuk menganalisa permasalahan. Selain itu, perbedaan lain yakni pada lingkup temporal, di mana pustaka ini membahas Pilkada tahun 2008, sedangkan skripsi ini akan membahas Pemilu 1999.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan mengenai kontestasi partai politik yang terjadi pada pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan ini perlu menggunakan konsep dan kerangka teoritik yang terkait dengan permasalahan. Pembahasan mengenai pemilu termasuk dalam lingkup pemahaman tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan suatu negara di mana semua warga negara memiliki hak dalam pengambilan keputusan. Demokrasi mengizinkan warga negara terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berbeda dari masa ke masa. Pada masa Orba, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Akan tetapi, pelanggaran terhadap demokrasi yang terjadi pada masa Orba memunculkan era baru yakni masa reformasi. Reformasi dimaknai sebagai masa perubahan secara menyeluruh dalam upaya perbaikan seluruh bidang kehidupan bernegara. Pada masa ini, bangsa Indonesia bersepakat melakukan proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh DPR.¹⁵ Salah satu langkah demokratisasi dalam reformasi yakni mengadakan pemilu.

Pengertian tentang pemilu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁶ Kontestasi pemilu menjadi upaya partai-partai politik memperebutkan dukungan rakyat untuk memperoleh kekuasaan di pemerintah. Pembahasan mengenai partai politik tidak lepas dari adanya kekuatan-kekuatan politik. Kekuatan politik adalah

¹⁵Budiardjo, *Dasar-Dasar*, hlm. 134.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

kekuatan yang dimiliki oleh aktor-aktor politik maupun lembaga yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.¹⁷

Konsep kontestasi dapat diartikan sebagai suatu kompetisi di mana setiap kontestan berupaya memperebutkan dukungan rakyat. Berlangsungnya suatu kontestasi pasti diikuti oleh beberapa kontestan. Pada skripsi ini kontestan pemilu diartikan sebagai partai yang menjadi peserta pemilu. Kontestasi pemilu yang terjadi pada pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan melibatkan beberapa partai politik. Konsep tentang partai politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 adalah setiap organisasi yang dibentuk warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan negara melalui pemilu.¹⁸ Menurut Miriam Budiardjo, tujuan partai politik ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁹

Permasalahan skripsi ini membahas mengenai kontestasi antara Partai Golkar dan PKB. Partai Golkar adalah partai pemerintah Orba yang telah memenangkan setiap kontestasi pemilu pada masa Orde Baru. PKB adalah partai Islam yang baru diresmikan berdiri pada 23 Juli tahun 1998. Partai Golkar sebagai kekuatan politik lama dan partai PKB sebagai kekuatan politik baru bersama partai lainnya mengikuti kontestasi pada Pemilu 1999. Dua kekuatan politik ini saling berusaha memobilisasi massa.

¹⁷Anthonius Sitepu, "Transformasi Kekuatan-kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia", *Jurnal Pemberdayaan Komunitas* Vol 3 No 3, 2004 (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/.../15663/PKM-Sep2004%20%288%29.pdf>, diunduh pada 23 Agustus 2018), hlm. 164.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

¹⁹Budiardjo, *Dasar-Dasar*, hlm. 404.

Mobilisasi massa adalah upaya pengerahan banyak orang.²⁰ Dalam konteks ini mobilisasi massa ditujukan untuk mengerahkan massa dalam memilih partai pada pemilu 1999. Upaya ini tidak lepas dari usaha setiap partai meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Konsep partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan.²¹

Partai politik yang mempunyai peran dalam pendidikan politik bagi masyarakat, saling berupaya meningkatkan kesadaran politik warga untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Kabupaten pamekasan sebagai salah satu kabupaten besar dengan dominasi penduduk Islam diwilayahnya, menjadi hal yang diperhitungkan bagi partai politik untuk menarik massa. Politik identitas menjadi konsep yang dipakai Golkar dan PKB dalam upaya menarik massa.

Politik identitas adalah mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari.²² Identitas masyarakat Pamekasan yang didominasi oleh santri. Hal tersebut turut menjadi salah satu identitas sosial yang digunakan partai politik untuk memobilisasi massa.

Persaingan antara Golkar dan PKB, masing-masing menggunakan strategi politik. Konsep strategi politik menurut Peter Schroder adalah seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang

²⁰“Kamus Politik” (<https://rebanas.com/kamus/politik/mobilisasi>, dikunjungi pada 24 Februari 2018).

²¹“Kamus Politik” (<https://rebanas.com/kamus/politik/partisipasi-politik>, dikunjungi pada 24 Februari 2018).

²²Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 3 No. 1, Februari 2012 (<http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/152/495>, diunduh pada 23 Februari 2018), hlm. 4.

menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi pemilu maupun pilkada.²³ Dalam pelaksanaan strategi partai di Kabupaten Pamekasan, partai-partai tidak bergerak sendiri menarik massa, namun ada peran kyai yang cukup signifikan untuk menggerakkan massa. Politik aliran oleh kyai dalam partai politik digunakan untuk memobilisasi massa. Konsep politik aliran sendiri adalah upaya partai politik yang melakukan mobilisasi massa dengan membentuk sejumlah organisasi onderbouw untuk menghadapi pemilu.

Pelaksanaan pemilu berlangsung sukses apabila ada partisipasi politik yang besar dari masyarakat. Akan tetapi, partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan perilaku pemilih. Konsep perilaku pemilih adalah tindakan pemilih yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk menentukan pilihannya dalam politik. Pada umumnya perilaku pemilih dipengaruhi oleh adanya sosok kharismatik, citra partai politik, hingga isu dan kebijakan politik. Adapun konsep kekuatan politik dimaknai sebagai kekuatan yang dimiliki oleh partai politik atau seseorang yang digunakan untuk menggaet massa dalam kontestasi politik. Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dapat menyebabkan munculnya pergeseran pemilih. Pergeseran pemilih adalah berpindahnya dukungan massa suatu partai politik ke pilihan politik lainnya.²⁴ Pergeseran pemilih yang terjadi di Pamekasan lebih dipengaruhi oleh adanya kekuatan kharismatik yang dimiliki oleh para kyai. Hal tersebut nampak pada berpindahnya dominasi pemilih Golkar yang umumnya adalah masyarakat NU. Dominasi pemilih Golkar memang beralih ke PKB, tetapi sebagian lainnya berpindah ke partai-partai lain seperti PDI-P, PAN, PBB, dan PKU.

Berpindahnya sebagian besar warga NU ke PKB tidak serta mempengaruhi kekuatan partai politik Islam seperti PPP. Dengan adanya kekuatan politik Kyai SI, PPP mampu mempertahankan basis massanya. Faktor citra partai politik turut mempengaruhi adanya perpindahan pemilih dari Golkar ke partai lainnya. Stigma

²³Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Fredriech-Naumann-Stiftung fuer die freiheit, 2003), hlm. 5 dalam Razaqtar, “Peran Partai Politik”, hlm. 3.

²⁴Atiq Komariyah, “Perubahan Pilihan Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2004” (Semarang: Skrips Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005) hlm. 14.

negatif yang melekat pada Golkar pasca runtuhnya Soeharto, menjadikan warga enggan memilih kembali Golkar sebagai pilihan politiknya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁵ Metode sejarah memiliki empat tahap berurutan yang dimulai dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahap heuristik adalah tahap pertama dalam metode penelitian sejarah. Heuristik adalah tahap mencari sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer menjadi sumber utama dalam penelitian sejarah. Sumber primer yang dapat ditemukan yakni arsip-arsip berupa hasil perolehan suara pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan.

Sumber primer berupa perolehan partai pemenang sudah diketahui oleh penulis melalui wawancara lisan dan penelitian orang lain terkait pemilu, namun akan lebih baik jika mendapatkan sumber primer dari instansi pemerintah. Pada pencarian ke berbagai instansi, penulis akhirnya menemukan sumber primer berupa lampiran penyelenggaraan Pemilu 1999 Kabupaten Pamekasan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur. Selain menemukan hasil pemilu, di sana penulis juga menemukan arsip berupa undang-undang yang terkait dengan Pemilu Tahun 1999.

Sumber primer lain hasil pemilu, penulis juga mencari data kependudukan di BPS Kabupaten Pamekasan. Data kependudukan Pamekasan tahun 1990-an cukup sulit ditemukan, dan hanya buku kependudukan yang ditemukan yakni Pamekasan Dalam Angka tahun 1995, 1996, dan 1999. Akhirnya untuk menemukan data kependudukan yang semakin banyak, penulis mencari data di Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

²⁵Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hlm. 32.

Sumber primer lainnya yakni media cetak koran. Penulis mencari koran-koran terkait topik di Monumen Pers Nasional Surakarta, Pusat Informasi Kompas Biro Jawa Tengah, dan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Dalam pencarian sumber koran, penulis menemukan beberapa berita yang berkaitan dengan topik. Pencarian koran di Monumen Pers terkendali oleh banyaknya koran-koran tahun 1999 yang hilang terutama Koran Jawa Pos yang cukup banyak memberitakan daerah Madura. Pada Perpustakaan Medayu Agung, penulis mendapatkan berita-berita terkait topik Pemilu 1999 yang cukup banyak.

Sumber lainnya berupa wawancara lisan juga telah didapatkan oleh penulis. Informan yang penulis temui yakni tokoh-tokoh partai politik yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada Pemilu 1999. Terdapat pula informan yang merangkap sebagai kyai dan anggota DPRD. Hasil wawancara lisan ini menjadi sumber primer bagi penulis dalam mengetahui berbagai strategi partai yang tidak dimuat di sumber lainnya.

Sumber sekunder yang dapat ditemukan yakni buku-buku penunjang yang terkait dengan topik. Buku-buku tersebut didapatkan dari Perpustakaan Umum Daerah Pamekasan, Perpustakaan STAIN Pamekasan, Perpustakaan Sejarah Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro. Sumber sekunder selain buku-buku terdapat pula artikel jurnal terkait topik penelitian yang didapatkan dari Jurnal Karsa STAIN Pamekasan. Penulis juga menemukan banyak artikel di jurnal-jurnal ilmu politik.

Kritik adalah langkah kedua dalam metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kebenaran dari sumber-sumber sejarah. Pada tahap ini, penulis melakukan kritik intern. Penulis membandingkan informasi yang didapat dari lampiran pemilu dan hasil wawancara lisan. Selain itu, lampiran pemilu turut dibandingkan dengan berita yang dimuat dalam media massa.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Tahap ini menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. Dalam tahap interpretasi membutuhkan imajinasi untuk memberi makna dalam rangkaian fakta-fakta sejarah. Dengan menghubungkan antar fakta-fakta ini nantinya akan memudahkan penulis dalam merangkai peristiwa sejarah secara berurutan.

Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi atau merekonstruksi peristiwa sejarah. Dalam tahap ini hasil interpretasi penulis atas fakta-fakta sejarah itu dirangkai menjadi sebuah cerita. Penulis berusaha untuk membentuk kembali sebuah peristiwa sejarah berdasar bukti-bukti yang dikumpulkan dan telah melalui proses interpretasi makna.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka isi yang disusun berdasarkan sumber yang tersedia. Dalam skripsi ini penulis menyusun bahasan berdasar sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan peneltian, tinjauan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat gambaran umum Kabupaten Pamekasan tahun 1999. Pada bab ini terdiri dari 4 subbab yaitu kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya, dan kondisi sosial politik.

Bab III membahas mengenai kontestasi Golkar dan PKB pada pemilu 1999 di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyelenggaraan pemilu tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan, kontestasi partai politik peserta pemilu beserta strategi kemenangan yang mereka miliki. Bahasan terakhir dalam bab ini adalah capaian hasil yang diperoleh Golkar dan PKB dalam merebut pemilih yang didominasi oleh umat Islam.

Bab IV membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kontestasi Golkar dan PKB dalam pemilu tahun 1999. Bahasan pertama diawali dengan penjelasan tentang meredupnya kekuatan politik Golkar di Pamekasan, kemudian dilanjutkan dengan bahasan tampilnya PKB sebagai partai baru dan munculnya PKB dalam panggung politik lokal yang berpengaruh. Bahasan terakhir bab ini mengenai ideologisasi politik aliran oleh kyai di Pamekasan.

Bab V adalah simpulan yang berisi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Madura terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut Kuntowijoyo, secara geologis, permukaan tanah di Madura didominasi oleh susunan batu dan endapan kapur dengan lapisan aluvial laut di sepanjang pantai utara.²⁶ Daerah yang terdiri dari bebatuan dan endapan kapur menjadikan sebagian daerah Pamekasan sebagai lahan yang tandus dan gersang.²⁷

Kabupaten Pamekasan secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pamekasan terletak pada posisi kuadran koordinat $6^{\circ} 5' - 7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan (LS) dan $113^{\circ} 19' - 113^{\circ} 88'$ Bujur Timur (BT). Berbentuk dataran pada bagian selatan dan daerah pegunungan di daerah tengah dan utara. Di daerah tengah dan utara umumnya memiliki udara yang cukup dingin dan digunakan untuk daerah pertanian karena tanahnya cukup subur dibandingkan dengan daerah selatan yang umumnya panas dan dekat dengan pesisir Selat Madura. Batas-batas administratif Kabupaten Pamekasan di sebelah utara dibatasi hamparan Laut Jawa sepanjang Kecamatan Batumarmar dan Pasean. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, dan sebelah selatan dibatasi Selat Madura. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang.²⁸

Pada tahun 1999 Kabupaten Pamekasan memiliki luas 792,30 km² dan terbagi habis dalam empat wilayah pembantu bupati. Empat wilayah pembantu bupati yakni Pamekasan, Galis, Pagentenan, dan Waru. Kabupaten Pamekasan memiliki

²⁶Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002) hlm 24.

²⁷Zainuddin Syarif, "Dinamika Politik Kiai dan Santri dalam Pilkada Pamekasan", (Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm. 74.

²⁸Badan Pusat Statistik, *Pamekasan Dalam Angka Tahun 1999*, (Pamekasan: Badan Pusat Statistik, 1999), hlm xi.

13 kecamatan. Pada wilayah bagian selatan Pamekasan terdiri dari Kecamatan Tlanakan dan Pamekasan (kecamatan kota). Wilayah bagian timur terdiri dari Kecamatan Galis, Pademawu, Larangan, dan Kecamatan Kadur. Pada bagian tengah terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Pegantenan dan Pakong. Wilayah bagian utara terdiri dari Kecamatan Waru, Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Pada wilayah barat Pamekasan terdiri dari Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan.²⁹

Tabel 2.1: Luas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 1999

No	Kecamatan	Luar daerah (Ha)
1	Tlanakan	4.810
2	Pademawu	7.189
3	Galis	3.186
4	Larangan	4.086
5	Pamekasan	2.647
6	Proppo	7.149
7	Palengaan	8.848
8	Pegantenan	8.604
9	Pakong	3.071
10	Kadur	5.242
11	Waru	7.003
12	Pasean	7.688
13	Batumarmar	9.707

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan tahun 1999

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat kecamatan terluas adalah Kecamatan Batumarmar yang memiliki luas 9.707 Ha atau 12,25% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luas hanya 2.647 Ha atau 3,34% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penggunaan tanah, Kecamatan Pegantenan merupakan kecamatan yang wilayahnya

²⁹Syarif, "Dinamika Politik Kiai", hlm 75.

paling banyak digunakan sebagai permukiman, sedangkan Kecamatan Tlanakan merupakan kecamatan yang paling banyak digunakan untuk perindustrian. Pada usaha tambak garam, wilayah terluas yang digunakan untuk pembuatan garam terdapat di Kecamatan Pademawu (1.007 Ha) kemudian disusul oleh Kecamatan Galis (820 Ha) dan Kecamatan Tlanakan (268 Ha).³⁰

Berdasarkan data statistik, penggunaan lahan di Kabupaten Pamekasan didominasi oleh tegalan yang penggunaannya mencapai 42,26% dari total luas lahan. Penggunaan lahan untuk sawah sebesar 16,42 %, permukiman sebesar 13,95%, hutan sebesar 1,47%, tambak garam sebesar 2,65%, industri sebesar 0.02%, tanah rusak sebesar 18,57%, dan lainnya sebesar 4,66%.³¹

Tipikal Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki iklim tropis dan terbagi dalam musim. Dua musim tersebut yaitu musim hujan yang jatuh sekitar bulan Oktober – April dan musim kemarau yang jatuh pada bulan April – Oktober. Suhu udara rata-rata berkisar antara 28°C – 30° C dengan kelembapan udara 80%. Rata-rata curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Pamekasan adalah 114,4 mm/tahun dan 12,30 hari. Berdasarkan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pagentenan merupakan daerah dengan rata-rata curah hujan paling tinggi yaitu 1.855 mm/tahun.³² Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, wilayah tertinggi berada 350 meter di atas permukaan laut, sedangkan wilayah terendah berada 6 meter di atas permukaan air laut.³³

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan catatan terakhir hasil registrasi penduduk tahun 1999 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 671.544 jiwa yang terdiri dari 324.333 laki-laki

³⁰Badan Pusat Statistik, *Pamekasan Dalam Angka Tahun 1998* (Pamekasan: Badan Pusat Statistik, 1998), hlm xiv.

³¹Badan Pusat Statistik, *Pamekasan Dalam Angka*, hlm.3.

³²Badan Pusat Statistik, *Pamekasan Dalam Angka*, hlm xii.

³³Badan Pusat Statistik, *Pamekasan Dalam Angka*, hlm 5.